

**Matrik Cascading Kinerja RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018**

ESELON II											
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (Tahun 2018)		Sasaran (Strategis)	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2018)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
Rendahnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70%	= (1.139/1.627) x 100 % = 70 %	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	LKD merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan desa LKD meliputi : LPM Desa & Kelurahan, PKK Desa/Kel dan PKK Kecamatan, RT, RK, LK	65 %	70%	= (1.139/1.627) x 100 % = 70 %
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70%	= (101/144) x 100 % = 70 %		Persentase DESA yang masyarakatnya terlayani lembaga ekonomi perdesaan					Dalam upaya untuk mewujudkan Desa yang mandiri harus dibarengi perbaikan tingkat perekonomian masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat sesuai potensi ekonomi Desa melalui BUMDesa dan lembaga ekonomi perdesaan lainnya

Rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	41%	= (48/144) x 100 % = 48% (berkembang,	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	Pengukuran Desa berkinerja baik dilakukan melalui evaluasi kinerja berdasarkan penilaian tingkat perkembangan Desa, (sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa meliputi : cepat berkembang, berkembang, kurang berkembang)	Jumlah Desa kategori cepat berkembang dibagi jumlah seluruh Desa di Kab.HSS x 100%	33%	41%	= (60/144) x 100 % = 41 %

Rendahnya Kualitas Perencanaan Desa	Meningkatkan kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan kategori Baik	80 %	= $\frac{115}{144} \times 100\%$ = 80 %	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	Perencanaan Desa yang baik disusun dengan adanya konsistensi pada dokumen perencanaan Desa (APBDesa, RKP Desa, RPJMDesa)	Jumlah Desa yang memiliki perencanaan Desa dengan kategori baik dibagi jumlah Desa di Kab.HSS X 100 % Definisi : Ketepatan waktu, Keselarasan dokumen2 perenncaanaan	75 %	80 %	= $\frac{115}{144} \times 100\%$ = 80 %
-------------------------------------	--	---	------	--	--	---	--	---	------	------	--

Rendahnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	82		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka DisPMD sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat/pelanggan melalui	Hasil survey/kuesioner dari pengguna pelayanan (PNS Kab.HSS)	80	82	
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%			Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Untuk lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	100 %	100%	
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%			Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada OPD	Jumlah temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan x 100	100 %	100%	
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A			Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Sebagai salah satu hasil kinerja OPD	Hasil penilaian	BB	A	

Esselon III						Esselon IV				
Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target (Tahun 2018)		Anggaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun 2018)	Anggaran 2018
11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga ekonomi Perdesaan yang aktif	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif dibagi jumlah seluruh LKD X 100 %	70%	= $\frac{1.139}{1.627} \times 100\%$ = 70 % = $\frac{1139}{1627} \times 100\%$	Rp 459,559,000	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina	49 LKD/ Adat	308,145,000
		Cakupan Lembaga ekonomi Perdesaan yang aktif	Jumlah Lembaga ekonomi perdesaan yang aktif dibagi jumlah seluruh Lembaga Ekonomi perdesaan X 100 %	70%	= $\frac{101}{144} \times 100\%$ = 70 %		Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	jumlah lembaga ekonomi perdesaan yang dibina	288 Lembaga/Kelompok	151,414,000
	Meningkatnya TP. PKK Desa/kel yang aktif	Cakupan kelompok binaan TP. PKK yang baik	Jumlah TP. PKK Desa/Kel yang terbina dibagi Jumlah TP. PKK Desa/Kel X 100 %	100%	= $\frac{148}{148} \times 100\%$ = 100 %	Rp 494,532,400	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	TP. PKK Desa/ Kel yang aktif	148 Desa	494,532,400
			Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Permendagri no. 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masy melalui gerakan PKK							
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Hasil survey/kuesioner dari pengguna pelayanan (PNS Kab.HSS)	82						

		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti oleh Bidang Pemberdayaan masyarakat	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100%						
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan x 100 %	100%						
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase pelatihan kompetensi bagi aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan.	Jumlah jenis pelatihan kompetensi yang dilaksanakan sampai dengan tahun berkenaan dibagi jumlah pelatihan kompetensi ideal x 100 %.	62,5 %	= $\frac{5}{8} \times 100 \%$ = 62,5 %	Rp 275,065,000	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan keuangan desa	288 Peserta	96,446,000
							Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan aset desa	144 Peserta	49,018,000
							Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang/jasa di desa	288 Peserta	77,546,000
	Meningkatnya implementasi kerjasama desa	Persentasi naskah kerjasama aktif lingkup Desa yang diimplementasikan	Jumlah kerja sama Desa yang aktif dan diimplementasikan dibagi jumlah kerjasama X 100 % . kolaborasi /	72%	= $\frac{8}{11} \times 100 \%$ = 72 %		Inisiasi Pembentukan Kerja Sama Desa	jumlah kerja sama desa diinisiasi	11 Desa	52,055,000
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Hasil survey/kuesioner dari pengguna pelayanan (PNS Kab.HSS)	82							
	Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti oleh Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100 %							
	Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Jumlah temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan x 100 %	100 %							

Program Pembinaan Keuangan Desa	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Desa	Persentas Desa yang memiliki i keselarasan RKPDesa terhadap RPJMDesa	= i1 + i2 + i3 dibagi 3 (tiga) X 100 % i1. Keselarasan sasaran = jumlah sasaran RKPDesa yang sesuai dengan sasaran RPJMDesa dibagi dengan jumlah sasaran di RPJMDesa i2. Kesesuai target = jumlah target RKPDesa yang sesuai dengan RPJMDesa dibagi dengan jumlah target RPJMDesa i3. Keselarasan bidang kegiatan = jumlah bidang kegiatan RKPDesa yang sesuai dengan RPJMDesa dibagi jumlah bidang kegiatan di RPJMDesa	80%	$= \frac{(115+115+115)}{144} \times 100 = 100\%$	Rp 361,591,440	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan evaluasi RPJMDes dan RKP Desa	144 RPJMDesa dan 144 RKP Desa	14,038,000
		Persentasi kesesuaian APBDesa terhadap RKPDesa	Jumlah kegiatan di APBDesa yang sesuai dibagi jumlah kegiatan di RKPDesa X 100 %	80 %	$= \frac{115}{144} \times 100\% = 100\%$		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Jumlah pelaksanaan evaluasi APBDesa	288 APBdes	273,251,040
		Cakupan pengendalian keuangan desa	Jumlah Desa dengan realisasi keuangan desa lebih dari 80 % dibagi jumlah Desa se Kab.HSS X 100 %	90%	$= \frac{130}{144} \times 100\% = 90\%$		Pengendalian Pelaksanaan APBDesa	Jumlah Desa yang dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan keuangan desa	144 Desa	66,516,000
Program Pembinaan Keuangan Desa	Meningkatnya kepatuhan Desa terhadap peraturan .						Koordinasi Laporan Keuangan Desa	Jumlah laporan keuangan desa yang tersusun	144 laporan	7,786,400
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Bidang Administrasi Pemerintah Desa	Hasil survey/kuesioner dari pengguna pelayanan (PNS Kab.HSS)	80						
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti oleh Bidang Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100%						
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Bidang Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan x 100 %	100 %						

Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	Hasil survey/kuesioner dari pengguna pelayanan (PNS Kab.HSS)	80	Rp 538,195,560	Penyediaan jasa surat menyurat	laporan kepegawaian diselesaikan tepat waktu	400 lbr	1,400,000
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang masuk dibagi jumlah yang ditindaklanjuti x 100 %	100 %		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kesesuaian data BMD dengan neraca simda	4 rek	55,800,000
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK / Inspektorat dibagi jumlah yang ditindaklanjuti x 100 %	100 %		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		3 bh	2,750,000
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	A		Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD		2 kali	11,000,000
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		15 buah	5,100,000
						Penyediaan alat tulis kantor		33 jenis	26,912,000
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		10 jenis	15,312,500
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		4 jenis	3,434,000
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		15 jenis	16,815,400
						Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4 eksemplar	4,800,000
						Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	17,090,000
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	287,900,000
						Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya		2 orang	30,150,000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12 bulan	59,731,660			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Rp 56,600,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan gedung kantor dengan kondisi baik	1 buah	30,000,000
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan operasional kategori baik	1 buah	26,600,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Rp	3,700,800	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	laporan AKIP diselesaikan tepat waktu	1 laporan	3,700,800
									LPPD diselesaikan tepat waktu	1 laporan	
									laporan keuangan diselesaikan tepat waktu	1 laporan	
											2,189,244,200